



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**UNIT KERJA** : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HARTOKO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
3. NHK : 802737

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.597.500.000

1. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI  
Rp. 235.000.000
2. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL  
SENDIRI Rp. 367.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/120 m2 di KAB / KOTA  
SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 995.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 145.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.  
9.000.000
2. LAINNYA, AIRMAN PDS 185 S Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.  
90.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.  
4.500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.  
20.500.000
5. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.  
21.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 95.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. 4.200.000

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.500.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 11.000.000

**Sub Total** Rp. 1.854.200.000



III. HUTANG

Rp. 205.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.649.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.